

PENDEKATAN KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN AGAMA DI NUSANTARA

Agus Susanto

Peradaban Islam Melayu

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: agus_medan98@yahoo.com

Abstract

This article discusses how to approach communication in the settlement of social and religious conflicts, causes and impacts caused by the conflict. In the discussion of this article revealed that social-culture and religion make our nation vulnerable to conflict, from the eastern end to the western end. Therefore, the issue of social-religious conflict needs to be resolved quickly by various parties. Factors that often lie behind the conflict are the curb of inter-religious adaptation, economic jealousy, narrow fanaticism, lack of knowledge of democracy and faith. While the impact is the disruption of security, the cracking of social relationships, destruction of the order of life, and countless material losses. The most important is the settlement of social and religious conflicts that can be taken is; Arbitration, which is immediately terminated by a third party in this case the government and law enforcement apparatus; Mediation, termination of the dispute by a third party but no binding decision is given; Conciliation, attempts to bring together the wishes of the disputing parties to achieve mutual consent; Stalemate, the situation when both opposing sides have a balanced power, then stops at a point not attacking each other; adjudication, resolution of conflicts in the courts by giving priority to the justice and impartial to anyone.

Keywords: Communication, Settlement, Conflict, Social-Religion

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana pendekatan komunikasi dalam penyelesaian konflik sosial dan agama, penyebab dan dampak yang diakibatkan konflik tersebut.

Dalam pembahasan artikel ini terungkap bahwa sosial-kultur dan agama membuat bangsa kita rawan konflik, dari ujung timur sampai ujung barat. Maka dari itu masalah konflik sosial-agama perlu diselesaikan secara cepat oleh berbagai pihak. Faktor yang kerap melatarbelakangi terjadinya konflik adalah kurangnya adaptasi antar agama, kecemburuan ekonomi, fanatisme sempit, kurangnya pengetahuan demokrasi dan

keimanan. Sedangkan dampaknya adalah terganggunya keamanan, retaknya hubungan sosial, rusaknya tata kehidupan, dan kerugian materil yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting adalah penyelesaian konflik sosial dan agama yang dapat ditempuh adalah; Arbitrasi, yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum; Mediasi, penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat; Konsiliasi, usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama; Stalemate, keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang; ajudikasi, penyelesaian konflik di pengadilan dengan mengutamakan sisi keadilan dan tidak memihak kepada siapapun.

Kata Kunci: Komunikasi, Penyelesaian, Konflik, Sosial-Agama

PENDAHULUAN

Tidak satupun manusia yang dapat hidup sendiri di dunia ini, satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan, memerlukan, melengkapi, dan memenuhi seputar kebutuhan hidupnya. Dengan adanya hal itulah mereka berkomunikasi sehingga terciptalah interaksi dan tanggapan perilaku seseorang, akan adanya interaksi-interaksi tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beragam adat istiadat, dan kepentingan sehingga sering terjadi pertikaian, yang berupa konflik disebabkan adanya perbedaan. Hal tersebut akan berdampak dalam kehidupan masyarakat baik aspek sosial, budaya, hukum, ekonomi, maupun kependudukan. Kehidupan manusia di bumi baik secara sendiri-sendiri (individu) maupun kelompok berbeda-beda. Apabila perbedaan-perbedaan yang ada dipertajam akan timbul pertentangan atau konflik.

Faktor-faktor yang menjadi akar timbulnya konflik harus diangkat dengan benar-benar jelas sampai kepermukaan publik, sebab dengan cara ini dicarikan solusinya. Etnik atau suku bangsa, biasanya memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Sesuatu yang dianggap baik

atau sakral dari suku tertentu mungkin tidak demikian halnya bagi suku lain. Perbedaan etnis tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis.

Konflik antar etnis ini terjadi karena benturan budaya, kepentingan, ekonomi politik, dan lain lain. Dan demi menciptakan Negara yang aman dan tentram, pemerintah harus menyelesaikan masalah konflik antar etnis. Cara yang lebih demokratik demi tercegahnya perpecahan, dan penindasan atas yang lemah oleh yang lebih kuat, adalah cara penyelesaian yang berangkat dari niat untuk *take a little and give a little*, didasari itikat baik untuk berkompromi dan bermusyawarah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, individu selalu dituntut untuk memiliki etika yang sesuai dengan kebudayaan yang dipegang oleh masyarakat setempat. Bukan hanya etika dalam berperilaku melainkan juga bagaimana seseorang berkomunikasi dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah ada sehingga mudah untuk dipahami. Selain mudah dipahami, etika dalam berkomunikasi juga dibutuhkan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat itu sendiri. Jika budaya berkomunikasi

dalam suatu masyarakat tidak dipahami dengan benar oleh setiap orang yang ada di dalamnya, kemungkinan akan banyak terjadi konflik karena adanya perbedaan pemahaman.

Selain dialog, resolusi konflik yang banyak ditawarkan adalah berbasis komunikasi antar budaya, yang lebih spesifik kearah *local wisdom*. Adalah multikulturalisme dan pluralitas agama sebagai bagian dari post-materialisme tersebut yang sekiranya menjadi patron konsepsi dalam membidani kearifan lokal untuk direvitalisasi di tengah iklim konflik yang bisa meletus setiap saat. Adapun studi awal yang mencoba untuk menganalisis mengenai relasi kearifan lokal dengan resolusi konflik agama dilakukan oleh John Haba. Haba dalam studinya yang berjudul “*Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*” melihat lima peran vital kearifan lokal sebagai media resolusi konflik keagamaan.¹ Yang *pertama* adalah kearifan lokal sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Identitas tersebut menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki budaya perdamaian yang berarti menunjukkan komunitas tersebut merupakan komunitas yang beradab. Hal ini dikarenakan konflik merupakan simbolisasi kultur barbarian. Tentunya dengan memiliki kearifan lokal, komunitas tersebut ingin mencitrakan dirinya sebagai komunitas yang cinta damai.

Kedua, kearifan lokal sendiri menyediakan adanya aspek kohesif berupa elemen perekat lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, kearifan lokal dapat diartikan sebagai ruang maupun arena dialogis untuk melunturkan segala jenis eksklusivitas politik identitas yang melekat di antara berbagai kelompok.

¹ John Haba, “*Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*,” dalam Irwan Abdullah, dkk. (ed.), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 334-335.

Adanya upaya menjembatani berbagai lintas kepentingan tersebut adalah upaya untuk membangun inklusivitas dalam meredam potensi konflik yang lebih besar lagi.

Ketiga, berbeda halnya dengan penerapan hukum positif sebagai media resolusi konflik yang selama ini jamak dilakukan oleh para penegak hukum yang kesannya “memaksa”. Hal inilah yang menjadikan resolusi konflik dengan hukum positif sendiri justeru sifatnya artifisial dan temporer meskipun memiliki kekuatan hukum tetap. Banyak di antara kasus anarkisme agama yang diselesaikan melalui pendekatan hukum positif justeru banyak dilanggar. Kearifan lokal sebagai bagian dari resolusi konflik alternatif justeru lebih ke arah mengajak semua pihak untuk berunding dengan memanfaatkan kedekatan emosi maupun kultural.

Keempat, kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas dan dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang dapat meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi. *Kelima*, Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkan di atas kebudayaan yang dimiliki. Maka bisa dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan bentuk sintesa dari unsur sosio-kultural dan sosio-keagamaan yang tujuannya adalah merekatkan kembali hubungan antar sesama masyarakat yang tereduksi perebutan kepentingan politik maupun ekonomi.²

Akibat percampuran budaya tersebut sering terjadi konflik-konflik yang tidak dapat dihindari. Tidak jarang

² Nurma Ali Ridwan, “*Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*.” *Jurnal IBDA*. Vol. 5, No.1, 2007, h. 31.

penyebabnya hanya karena cara berkomunikasi yang tidak dipahami dengan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap orang akan cenderung menggunakan cara berkomunikasi sesuai dengan kebiasaannya dari kecil. Memang agak susah untuk menyesuaikan cara berkomunikasi di tempat lain terutama yang baru saja ditempati. Pada artikel ini, penulis berupaya menawarkan pendekatan komunikasi dalam penyelesaian konflik agama dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam terhadap Komunikasi Antar Budaya

Islam merupakan agama yang terbaik dan mendapatkan tempat di sisi Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya: “Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam”.³ Agama Islam berisi ajaran, tuntunan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai hamba Allah, individu, anggota masyarakat maupun sebagai makhluk sosial yang mendunia. Islam memiliki keteraturan hidup, keteraturan hukum dan keteraturan ajaran kemasyarakatan yang religius. Islam memiliki Tuhan yang satu juga doktrin agama yang satu yaitu al-Qur’an.

Orang-orang non Islam menempatkan manusia sebagai subjek bebas dari nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu nilai-nilai yang berkembang dari waktu ke waktu bergantung pada kesepakatan yang ada dalam masyarakat. Adapun Islam datang menempatkan manusia sebagai subjek yang tunduk dan patuh pada nilai-nilai *ilahiah*, bukan nilai-nilai yang hanya sekedar berkembang dalam masyarakat saat ini.⁴ Acep secara agak terperinci menjelaskan perbedaan antara manusia dan makhluk lainnya. Secara ringkas

disimpulkan: “*The only different is that while every other creature follows its nature automatically, man ought to follow his nature, this transformation of the is into ought is both the unique privilege and the unique risk of man*”⁵

Telaah ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang manusia, memberi gambaran *kontradiktif* menyangkut keberadaannya. Di satu sisi manusia dalam al-Quran sering mendapat pujian Tuhan. Seperti pernyataan terciptanya manusia dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya, kemudian penegasan tentang dimuliakannya makhluk ini dibanding dengan kebanyakan makhluk-makhluk lain. Sedang di sisi lain sering pula manusia mendapat celaan Tuhan. Seperti bahwa ia amat aniaya dan ingkar nikmat, dan sangat banyak membantah serta bersifat keluh kesah lagi kikir.⁶

Gambaran kontradiktif itu bukanlah berarti bahwa ayat-ayat yang berbicara perihal manusia bertentangan satu sama lain, melainkan justru menandakan bahwa makhluk yang bernama manusia itu unik, makhluk yang serba *dimensi*, dan makhluk yang berada di antara *predisposisi* negatif dan positif.⁷ Hal ini dapat difahami dengan mengkaji asal-usul kejadiannya, proses penciptaannya dan keragaman terminologinya dalam al-Quran.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan manusia adalah merupakan makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam upaya pencapaian kebutuhannya, manusia harus berhadapan dengan manusia lain yang juga mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan individualnya, sehingga kerap terjadi suatu konflik kepentingan antar manusia. Sebagai jalan tengah

⁵ Aripudin, *Dakwah Antar Budaya*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 42

⁶ Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 23

⁷ Mohammad Irfan, dkk, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2003), h. 55

³ QS. Ali Imran: 19

⁴ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2002), h. 55

untuk mengurangi risiko terjadinya konflik, dimunculkan suatu nilai, norma, atau aturan bersama yang disebut dengan etika bersama. Etika bersama inilah yang kemudian secara berkelanjutan dari generasi ke generasi menjadi suatu norma bersama dan akhirnya berkembang menjadi budaya.

Komunikasi dalam Islam di samping untuk mewujudkan hubungan secara vertical dengan Allah Swt, juga untuk menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Komunikasi dengan Allah Swt tercermin melalui ibadah-ibadah fardhu (salat, puasa, zakat dan haji) yang bertujuan untuk membentuk takwa. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang disebut *muamalah*, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, seni dan sebagainya. Bagi Islam, komunikasi merupakan salah satu fitrah manusia. Hal itu dapat dilihat pada al-Quran berbunyi: “(Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan al Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara.”⁸

Bahwa obyek bahkan sekaligus yang menjadi subyek komunikasi Islam adalah manusia. Dengan demikian, obyek penelaahan ilmu komunikasi Islam juga manusia itu sendiri. Manusia yang menyampaikan pesan kepada sesamanya, bahkan ketika manusia berdo’a yang diyakini sebagai komunikasi antara manusia dengan Tuhan (komunikasi transendental) yang ditelaah adalah manusia itu sendiri, tentang bagaimana ia memanjatkan do’a, etikanya pada saat berdo’a, sampai kepada diterima atau tidaknya do’anya dengan melihat dampaknya terhadap dirinya atau yang dido’akannya. Kendati yang terakhir ini tentu saja sulit terdeteksi, tetapi paling tidak ada dampak yang dirsakannya

mungkin dari sikap maupun perilakunya.

Sementara itu, berdasarkan pengertian dan pemahaman penulis sendiri terhadap pengertian obyek formal sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi obyek formal ilmu komunikasi Islam tidak lain adalah segala pesan (*message*) yang sesuai dengan ajaran Islam dengan berdasarkan kepada al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw.

Tentu saja pesan yang menjadi kajian dalam ilmu komunikasi Islam adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan sesuai dengan pesan-pesan yang diinginkan oleh al-Quran maupun Hadis Nabi Saw. Hal ini memang perlu ditekankan, sebab perbedaan mendasar antara komunikasi Islam dengan komunikasi umum lainnya terutama terletak pada latar belakang filosofisnya (al-Quran dan Hadis Nabi Saw.) dan aspek etikanya yang juga didasarkan pada landasan filosofi tersebut.⁹

Komunikasi umum (non-Islam, non-religius) sebenarnya juga mengadopsi etika, tetapi sanksi atas pelanggaran komunikator terhadap etika komunikasi hanya berlaku di dunia. Sedangkan sanksi atas pelanggaran terhadap etika komunikasi Islam berlaku sampai di akhirat. Ada hukuman akhirat dan hukuman di alam kubur. Banyak sekali ayat dalam al-Quran yang menjelaskan akan adanya hukuman bagi pelanggar-pelanggar etika komunikasi, baik secara eksplisit maupun implisit. Tetapi sanksi itu akan tidak berlaku lagi jika si pelanggar sudah bertaubat atau minta ampun, jika Tuhan telah mengampuninya.

Jika pesan merupakan bahan yang akan disampaikan kepada komunikan, maka sumber pesan dalam komunikasi Islam ada tiga kelompok, yaitu:

⁹ Sumber: <http://alfarizisalman.blogspot.com/2010/07/ontologi-dalam-perspektif-islam.html>, diakses 24 Desember 2017.

⁸ QS. Ar-Rahmān: 1-4

1. Sumber primer; al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, sedangkan pada komunikasi umum (Barat) informasi yang bersifat primer didapatkan dari pemegang otoritas secara langsung (*first hand information*), seperti tesis, surat, jurnal, dan sebagainya.
2. Sumber sekunder; Ijma', qias, *masālih al-mursalah*, fatwa sahabat, amal penduduk Madinah, informasi dari tamaddun/peradaban lainnya, sedangkan pada komunikasi umum (Barat) yang menjadi sumber sekunder komunikasi adalah tulisan atau perkataan yang menjelaskan sumber primer, seperti indeks, abstraksi, bibliografi, dan sebagainya.
3. Sumber tertier; pesan/informasi atau ilmu yang dikembangkan dari sumber sekunder yang memunculkan ilmu-ilmu baru, sedangkan pada komunikasi umum (Barat) sumber tertier adalah suatu informasi tentang sesuatu yang hal yang berkaitan dengan informasi-informasi lainnya, seperti bibliografi untuk bibliografi, buku tahunan atau laporan tahunan, dan sebagainya.

Berbagai literatur tentang komunikasi Islam dapat ditemukan setidaknya enam jenis gaya bicara atau pembicaraan (*qaulan*) yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam, yakni: (1) *Qaulan Syadida* (lurus dan benar), (2) *Qaulan Baligha* (tepat), (3) *Qaulan Ma'rufa* (baik), (4) *Qaulan Karima* (mulia), (5) *Qaulan Layyinan* (lemah lembut), dan (6) *Qaulan Maysura* (ucapan yang mudah).

Bagi Islam dasar-dasar untuk hidup bersama di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik secara religius sejak semula memang telah dibangun atas landasan normatif dan historis. Seiring dengan berjalannya waktu kemudian membawa masyarakat Islam untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan kelompok-kelompok

masyarakat yang lainnya. Pertemuan budaya dengan masyarakat lain melahirkan tarik menarik serta perkawinan masyarakat yang lainnya.

Konflik Sosial-Agama: Penyebab dan Dampaknya

Berdasarkan fungsi komunikasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat difahami bahwa pesan dalam sebuah komunikasi sangat berpengaruh di dalam masyarakat, melalui pesan tersebut akan terbentuk satu ikatan yang kuat atau sebaliknya justru memperlebar jarak antar masyarakat. Jarak antara masyarakat tersebut dapat terbentuk dalam berbagai situasi dan kondisi, bila terjadi kesenjangan, maka disitulah muncul konflik yang dalam hal ini dapat menjadi konflik sosial. Karena konflik sosial dalam proses komunikasi sering ditimbulkan oleh akibat pesan yang disampaikan dalam setiap aktivitas pertukaran pesan, baik dalam komunikasi interpersonal, antarpersonal, kelompok, media maupun dalam bentuk komunikasi massa. Penyebabnya adalah setiap pesan yang ditimbulkan berbeda pemaknaan antara komunikan dengan komunikator. Jika pesan tidak terlalu menegangkan masih dapat dipahami setiap individu, kelompok, dan massa mampu mengendalikan emosinya yang mengarah pada konflik. Akan tetapi apabila emosi setiap lingkungan penerima pesan ditekan secara terus menerus maka timbullah berbagai konflik sosial budaya yang berkepanjangan.

Konflik sosial merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.

Konflik sosial yang digerakkan oleh “gerakan sosial klasik” (*old social movement*) yang sepenuhnya berorientasikan pada gugatan rasa-keadilan materil. Secara konkret, konflik sosial mewujudkan dalam bentuk tuntutan pemenuhan kebutuhan minimal pokok demi menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat, seperti: redistribusi lahan bagi petani non-tanah, tuntutan peningkatan upah-minimum bagi buruh industri, peningkatan derajat kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum lainnya bagi masyarakat miskin, dan sebagainya. Konflik sosial yang dimunculkan oleh “gerakan sosial baru” (*new social movement*) yang berorientasikan sangat kuat pada pemenuhan kebutuhan akan pengakuan atas eksistensi ideologi baru atau arus-pemikiran baru dalam sistem tata-kehidupan sosio-politik nasional. Ideologi-ideologi seperti demokratisme, *ecologism*, *sustainability*, *good-governance*, feminisme adalah contoh-contoh dari arus pemikiran baru yang menghendaki pengakuan tersebut.¹⁰

Benturan sosial demi benturan sosial berlangsung dengan mengambil bentuk aneka-rupa serta menyentuh hampir di segala aspek (*frame of conflict*) kehidupan masyarakat (konflik agraria, Sumber Daya Alam, nafkah, ideologi, identitas-kelompok, batas teritorial, dan sebagainya). Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa apapun bentuk benturan sosial yang berlangsung akibat dari konflik sosial, maka akibatnya akan selalu sama yaitu stress sosial, kepedihan (*bitterness*), disintegrasi sosial yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka aset-aset material dan non-material. Kehancuran

asset-asset non-material yang paling kentara ditemukan dalam wujud “dekapitalisasi” modal sosial yang ditandai oleh hilangnya *trust* di antara para-pihak yang bertikai, rusaknya *networking*, dan hilangnya *compliance* pada tata aturan norma dan tatanan sosial yang selama ini disepakati bersama-sama).¹¹ Seolah semua yang telah dengan susah payah dibangun dan ditegakkan oleh masing-masing warga yang bertikai, dengan mudah diakhiri begitu saja karena konflik sosial.

Dilihat dari ruang konflik, maka secara teori terdapat tiga ruang konflik sosial pada arus antar-ruang kekuasaan, yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu “ruang kekuasaan negara”, “masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial”, dan “sektor swasta”.¹² Pada ruang kekuasaan Negara, warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadapan-melawan negara dan sebaliknya. Konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas sosial melawan swasta dan sebaliknya. Konflik sosial yang berlangsung antara swasta berhadapan-melawan Negara dan sebaliknya.

Pada ruang masyarakat sipil, berlangsung konflik sosial yang tidak kalah intensifnya antara sesama kolektivitas sosial dalam mempertentangkan suatu obyek yang sama. Hal ini dipicu oleh cara pandang yang berbeda-beda dalam memaknai suatu persoalan. Perbedaan mazhab atau ideologi yang dianut oleh masing-masing pihak bersengketa menjadikan friksi sosial dapat berubah menjadi konflik sosial yang nyata. Pada ruang sektor swasta konflik sosial lebih banyak terjadi oleh karena persaingan usaha yang makin ketat. Kendati demikian, konflik sosial juga bisa dipicu oleh karena kesalahan Negara dalam mengambil kebijakan dalam “pemihakan” kepada kaum lemah.

¹⁰ Arya Hadi Dharmawan, *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*, Makalah disusun dan disajikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema: “Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional”, Pontianak 10-11 Januari 2007, h. 2

¹¹ Arya Hadi Dharmawan, *Konflik-Sosial*...h. 1

¹² *Ibid*, h. 3

Misalnya, konflik sosial para pedagang usaha kecil dan menengah melawan perusahaan retail swasta multinasional yang merasuki kawasan-kawasan yang sesungguhnya bukan “lahan bermain” mereka.

Secara kesejarahan bangsa Indonesia sesungguhnya bukanlah bangsa yang “bebas dari konflik sosial” (*social-conflict free*). Jatuh bangun dan perluasan kekuasaan pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu (seperti Majapahit) dan Islam (Mataram) di nusantara sangat kental dengan strategi konflik sosial yang bahkan menjadi *mode of struggle* mereka. Sejarah pergerakan nasional modern yang diinisiasi oleh Budi Utomo pun sangat kental dengan aroma pertentangan-perjuangan dan kesadaran-kelas antara bangsa terjajah melawan bangsa penjajah (Belanda). Tahun 1945 adalah titian tertinggi proses-proses konfliktual yang ditandai dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perjuangan dan perjalanan konflik yang sangat melelahkan dan memakan banyak korban.

Secara realitas, konflik sosial terus terjadi secara berulang dan terus-menerus mereplikasi dirinya dari satu tempat ke lain tempat dengan bentuk yang beraneka rupa di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Konflik sosial, seolah kini telah menjadi bagian dari “rutinitas dan keseharian” masyarakat Indonesia. Intensitas dan persebaran kejadian konflik sosial menguat sejalan dengan multiplikasi kejadian konflik sosial yang dihembuskan-diberitakan melalui berita-berita tentang konflik sosial di media massa. Pemunculan berita tentang konflik sosial di koran dan televisi telah membuat “proses sosialisasi” tanpa disadari telah membentuk opini tentang perbedaan kepada warga masyarakat di lain tempat untuk meniru dan mengimitasi “proses-proses penyelesaian masalah melalui jalan kekerasan dan *violence*” bagi persoalan serupa yang dijumpai di lokalitas masing-masing. Melihat

proses-proses konflik sosial yang demikian tertanam dalam sejarah dan terus “disegarkan” dalam ingatan tiap warga melalui media-media informasi dan pendidikan, maka sesungguhnya konflik sosial di Indonesia bukanlah “barang baru dan aneh”. Ia hanya berubah bentuk dan semangat.

Perlu diketahui, bahwa penyebab terjadinya konflik sosial keagamaan di masyarakat, disebabkan antara lain:

1. Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat

Salah satu faktor terjadinya konflik sosial adalah terjadinya perubahan sosial pada masyarakat. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan lain, yang dapat menimbulkan dampak yang berbentuk sebuah kemajuan (*progress*) maupun berbentuk sebuah kemunduran (*regress*). Sebagaimana diuraikan Abdullah Idi, bahwa perubahan sosial adalah proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial.¹³ Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses sosial. Dengan perubahan sosial juga merupakan gejala yang melekat di masyarakat yang dapat di ketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada suatu waktu dengan keadaan masyarakat pada masa lampau, misalnya dibeberapa masyarakat Indonesia umumnya (pada masa lampau), suami merupakan posisi yang sangat dominan dalam berbagai macam urusan dalam kehidupan keluarga, sehingga apabila tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan, suatu keluarga secara ekonomi akan mengalami lumpuh.

2. Perbedaan antar perorangan

¹³ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 216

Perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian atau pendapat. Dan perbedaan-perbedaan inilah yang dapat melahirkan sebuah konflik, karena memang sudah fitrahnya, setiap individu itu dalam intraksinya dengan masyarakat tentunya tidak selamanya mempunyai perspektif atau pendapat yang dalam menanggapi sesuatu.

3. Perbedaan Kultur Budaya dan Agama

Di Negara multikultural seperti Indonesia ini, tentunya tidak dapat pungkiri lagi, terjadi banyak konflik sosial dalam masyarakat karena terjadi perbedaan sudut pandang kultur budaya dan juga agama yang di yakini masing-masing. Dalam merespon begitu maraknya terjadi kekerasan karena terjadi perbedaan dalam kultur budaya dan juga mengatasnamakan agama, maka lahirnya banyak tokoh-tokoh moderat dan liberal sekuler di Indonesia yang meyumbangikan pemikirannya, misalnya Nurcholis Madjid dengan Pluralismenya, Gusdur dengan Pribumisasi Islam dan sebagainya.

4. Perbedaan Kepentingan

Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan setiap individu mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian halnya pula dengan suatu kelompok tentunya akan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang tidak sama dengan kelompok lain. Jadi terjadinya perbedaan terhadap kebutuhan dan kepentingan baik individu atau kelompok inilah salah satu dari penyebab terjadinya konflik sosial.

Secara garis besar, ada beberapa hal yang sering menjadi penyebab terjadinya konflik sosial di Indonesia, yaitu antara lain;

1. Kecemburuan ekonomi, biasanya, suku pendatang yang mampu meraih keberhasilan di bidang ekonomi akan menimbulkan kecemburuan pada penduduk asli, hal ini akan menyebabkan terjadinya gesekan karena menganggap bahwa suku pendatang merebut potensi ekonomi yang seharusnya mampu menyejahterakan suku asli.
2. Rasa fanatisme sempit, hal ini juga menyebabkan ada perasaan bahwa kepentingan kelompok harus dibela, terlepas dari posisi benar atau salah.
3. Kurangnya pengetahuan, dalam penyelesaian masalah secara demokratis.
4. Kurangnya pendidikan agama, pendidikan agama sangat penting untuk memberi nilai-nilai moral dalam pengendalian diri, dalam pergaulan.

Sedangkan adanya berbagai konflik sosial dan agama yang terjadi akan menimbulkan dampak, baik yang bisa dirasakan secara langsung atau tidak. Dampak ini bukan hanya menimpa pada kelompok yang tidak terlibat konflik saja, tetapi tidak kemungkinan juga menimpa pada kelompok yang tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, yaitu antara lain:

1. Menimbulkan hilangnya rasa aman, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan konflik akan selalu di hantui ketakutan apabila konflik kembali terulang.
2. Hilangnya persatuan bangsa, dengan konflik sosial tersebut, maka persatuan bangsa akan mudah hilang karena masing-masing pihak enggan untuk diajak berdamai/rujuk.
3. Rusaknya tata kehidupan, konflik membuat masyarakat kehilangan

kesempatan untuk bekerja, mencari nafkah atau mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.

Kerugian materil yang tidak terhitung, karena sebuah konflik merusak fasilitas hidup umum maupun pribadi dapat terjadi seperti, pembakaran rumah, pasar, sekolah atau tempat ibadah.

Pendekatan Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik Sosial dan Agama

Salah satu isu penting yang seringkali menimbulkan perdebatan dalam studi konflik termasuk konflik keagamaan adalah mengenai apa sebenarnya akar dari konflik yang terjadi. Setidaknya ada dua hal yang biasa diperdebatkan pertama apakah faktor yang dianalisis benar-benar merupakan penyebab konflik atau hanya isu yang muncul di permukaan sedangkan penyebab sebenarnya tersamarkan atau bahkan tidak tersentuh sama sekali. Kedua jika terdapat beberapa faktor penyebab sekaligus faktor mana yang lebih dominan atau mungkin perlu dianalisis mana yang merupakan penyebab dan mana yang hanya sekedar pemicu. Ini menuntut peneliti harus menggali lebih jauh dan melakukan pemilahan yang jelas, perbedaan perspektif yang digunakan tentunya juga akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dalam menganalisis aktor yang terlibat peran dan hubungan antar aktor pola mobilisasi cara penyelesaian dan sebagainya.

Idealisme agama yang penuh damai dan toleransi serta cinta kasih, yang diajarkan dan terdapat dalam teks suci agama-agama mengalami masalah berat, karena dalam realitasnya agama bersentuhan dengan *discrimination, intolerant, attitude, prejudices, hatred, threat, fundamentalism*, dan lain sebagainya hingga puncaknya *bomb (terrorism, extremism, radicalism, hard*

liners).¹⁴ Perbedaan antara idealisme dan realisme tersebut membutuhkan kerja keras semua manusia khususnya yang berakal (ilmuan) untuk mencari solusinya. Salah satu solusi yang sekarang sedang hangat diperbincangkan adalah *dialogue (dialog)*.¹⁵

Gagasan resolusi konflik sosial keagamaan yang mayoritas dipakai akhir-akhir ini adalah dialog dengan pola komunikasi multi arah (*multi way communication*). Wacana dan gerakan dialog antar umat beragama telah mengalami kemajuan yang signifikan. Tentu saja hal ini berangkat dari kesadaran bahwa pada dasarnya semua umat beragama (dalam hal ini manusia sebagai pelaku) sangat mendambakan perdamaian, kasih sayang, cinta kasih dan hidup bahagia bersama orang-orang yang dicintainya. Secara normatif hal itu telah menjadi ajaran semua agama yang termaktub dalam teks-teks suci masing-masing. Demikian indahnya bayangan masing-masing pemeluk agama, sekiranya manusia mengamalkan ajaran agama secara benar, tidak hanya sebatas level agama simbolik, tetapi seharusnya telah mengarah pada level agama subyektif dan agama obyektif.¹⁶ Walaupun

¹⁴ Amin Abdullah, "Religious Violence: Its Origin, Growth and Spread," kuliah umum pada Filsafat Agama dan Resolusi Konflik Tahun 2010.

¹⁵ Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antar Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2004, cet. I), h. 72

¹⁶ Agama simbolik adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa penganut suatu agama dalam memahami agama pada tataran ajaran atau ilmu, kalau dalam terminologi lain, agama simbolik adalah syari'at. Sedangkan agama subyektif adalah merupakan kesadaran atau iman dari pemeluk suatu agama atau dalam istilah lain disebut dengan aqidah. Dan agama obyektif adalah merupakan pengamalan atau kelakuan pemeluk agama terhadap ajaran suatu agama yang ia yakini atau dengan istilah lain adalah akhlak. Lihat dalam tulisan Masdar Farid Mas'ud yang berjudul "agama dan dialog" dalam buku *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*

memang ketiga level tersebut adalah sangat berkaitan, tetapi bila dalam pelaksanaannya hanya berlaku salah satunya, maka di sinilah akan terjadi ketimpangan dan akan menjadi akar menuju konflik dan kekerasan.

Dialog antar agama mulai digalakkan secara serius yaitu sejak konsili vatican II dideklarasikan pada 1965, dan untuk pertama kalinya dialog diadakan secara resmi di Beirut yang dihadiri oleh 28 orang utusan Kristen, 4 wakil Budha, 5 wakil hindu dan 5 orang dari Islam.¹⁷ Dialog yang sedang digalakkan ini merupakan suatu cara untuk dapat saling memahami satu sama lainnya. Sehingga terwujud kerukunan, pembinaan toleransi, membudayakan keterbukaan, mengembangkan rasa saling menghargai, saling pengertian kerjasama dan sebagainya.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penyelesaian konflik tersebut, yaitu:

1. Arbitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak dengan memberikan sanksi yang tegas apabila. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulang kali di mana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal.
2. Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat.
3. Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama..
4. *Stalemate*, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang. Keadaan ini

terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur .

5. *Adjudication* (ajudikasi), yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan dengan mengutamakan sisi keadilan dan tidak memihak kepada siapapun.

Fenomena di lapangan, bahwa dialog yang terjadi baru pada tataran “elit agama”, sehingga dialog yang dicanangkan hanya sebatas selogan dan pada tataran agamawan dan kelompok intelektual saja, belum menjadi dialog kultural. Seperti yang pernah penulis alami ketika mengikuti sebuah acara “dialog lintas agama” Nasional, dialog dilaksanakan justeru menimbulkan konflik karena masih adanya unsur kecurigaan (*su’uzhan*) satu sama lain. Kasusnya sangat sederhana, karena panitia pelaksana menyamaratakan jenis makanan yang dikonsumsi (khususnya daging) bagi peserta dialog. Tentu bagi peserta Hindu (agama) hal ini dianggap palecehan terhadap nilai agama mereka. Dari kisah sederhana tersebut tampak bahwa tingkat pemahaman agama seseorang masih pada level simbolik, penulis tidak bermaksud mencari siapa yang “benar dan salah”. Tetapi hal ini menunjukkan betapa urgennya pemahaman terhadap dialog ini bagi semua lapisan. Dalam dialog sangat ditekankan perinsip kejujuran dan keterbukaan.

Secara etimologis kata dialog berasal dari bahasa Yunani “*dia-logos*”, yang berarti bicara antara dua pihak, atau “*dwiwicara*”. Lawannya adalah “monolog” yang berarti “bicara sendiri”. Arti yang sesungguhnya, dialog adalah percakapan dua orang atau lebih dalam di mana diadakan pertukaran nilai yang dimiliki masing-masing pihak.¹⁸ Dialog juga dapat berarti tulisan dalam bentuk percakapan atau pembicaraan, diskusi antar orang-orang atau pihak-pihak yang berbeda

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, cet. I), h. 151.

¹⁷ Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis*, h. 24.

¹⁸ Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan AntarAgama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005, Cet. ke-III), h. 41.

pandangan. Dialog dapat berupa karangan prosa atau puisi untuk menyatakan berbagai pandangan yang berbeda.¹⁹

Dalam konteks dialog antar agama adalah penyatuan hati dan pikiran antar pelbagai agama. Tetapi bukan suatu proses mengurangi loyalitas dan komitmen seseorang terhadap kebenaran keyakinan yang telah dipegang dan diyakininya selama ini, akan tetapi lebih menguatkan dan memperkaya keyakinan. Dialog yang dimaksud adalah dialog dalam arti yang seluas-luasnya. Bisa dilakukan secara formal dalam ruangan tertentu dengan pemeluk agama tertentu pula. Bisa juga dilakukan secara alami yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan dimana pemeluk agama berada. Dialog bukan perdebatan. Dalam dialog setiap peserta dialog atau kawan harus mendengarkan kawan yang lainnya secara terbuka dan simpatik, serta penuh dengan kejujuran, sehingga masing-masing peserta dialog dapat secara benar memahami apa yang menjadi persoalan dialog.

Untuk lebih mengefektifkan dialog ini, Swidler²⁰ membuat aturan-aturan dasar dalam melakukan dialog (disebutnya sebagai *ground rules*). Aturan-aturan tersebut antara lain, *pertama*, tujuan dialog adalah untuk belajar, dan dalam proses dialog bisa saja dapat mengubah persepsi tentang pemahaman peserta dialog. *Kedua*, Setiap partisipan dialog harus dilakukan dengan jujur, tulus dan ikhlas.²¹ Dan

sebaliknya sebagian partisipan harus berasumsi bahwa *partner* dialognya menjunjung asas kejujuran, ketulusan dan keikhlasan.

Ketiga, dalam dialog peserta dialog tidak boleh membandingkan pemikiran ideal dengan pemikiran yang dikemukakan *partner*. *Keempat*, peserta dialog harus secara sadar bahwa ia hanya mendefinisikan dirinya. Atau dengan kata lain peserta dialog harus bicara sesuai kapasitas keyakinan yang ia yakini. Orang Muslim misalnya, harus secara benar-benar membicarakan pada posisi itu. *Kelima*, dialog hanya dilakukan pada posisi yang sama. Artinya dialog dapat dilakukan hanya pada posisi penuh dengan persamaan. *Keenam*, dialog dilakukan atas dasar saling percaya.²² *Ketujuh*, peserta dialog paling tidak dari dialog yang dilakukan dapat memberi kritik terhadap dirinya sendiri, agar ajaran keagamaan yang ia yakini dapat menambah dan memperkaya religiusitas pribadi. *Kedelapan*, peserta dialog hendaknya mencoba untuk mengalami agama atau ideologi *partner* dialognya “dari dalam”, sehingga tidak hanya pada pemahaman yang ada di kepala, tetapi juga spirit, hati dan semua kemanusiaan.

Bagi John Dunne yang terakhir ini disebut sebagai “*passing over*”. Metode ini bila dapat dijalankan dengan sungguh dapat mencapai apa yang didambakan semua manusia. Menurut Hans Kung bahwa dialog bukan hanya terhenti pada ko-eksistensi, melainkan juga pro-eksistensi.²³ Artinya dialog

¹⁹ Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis*, h. 20.

²⁰ Muhammad Wahyuni Nafis, *Passing Over Melintas Batas Agama*, (Jakarta : PT. SUN, 2011, cet. III), h. 96-97.

²¹ Menurut Istilah Reuel L. Howe, peserta dialog harus memiliki pribadi yang “utuh”, dengan kata lain peserta dialog harus terbebaskan dari sikap memberikan penjelasan yang setengah-setengah, ia hadir dengan seluruh pribadi dan memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap *partner* dialog. Dan ditambahkan bahwa peserta dialog harus disiplin. Artinya, peserta dialog harus secara konsekuen mematuhi tata tertib dialogi. Lihat

dalam Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan AntarAgama*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005, cet. III), h. 42-43.

²² Dalam prinsip psikologis dialog sejati hendaknya didasari oleh (1) keterbukaan pihak lain, (2) kerelaan berbicara dan memberikan tanggapan kepada pihak lain, (3) saling percaya bahwa kedua belah pihak memberikan informasi yang benar dan caranya sendiri. Lihat, Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan AntarAgama* (Jakarta : Ciputat Press, 2005, cet. III), h. 41.

²³ Lihat dalam tulisan St. Sunardi, *Dialog cara baru beragama*, yang dikumpulkan dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*,

tidak hanya mengantarkan sikap setiap agama untuk bereksistensi secara bersama-sama, melainkan juga mengakui dan mendukung, bukan berarti menyamakan eksistensi semua agama. Dialog semacam ini menuntut sikap terbuka dari pada defensif.

Agar dialog lebih efektif, peserta dialog harus memperhatikan beberapa kemungkinan rintangan dalam dialog dan diupayakan untuk dihindari. Sehingga tujuan dialog tidak tercapai, menurut Said Agil Husin Al Munawar²⁴ beberapa rintangan yang harus diatasi oleh peserta dialog, antara lain:

1. Rintangan bahasa. Sebuah kata yang sama ucapannya dapat menimbulkan pengertian yang berbeda bagi orang lain. Sehingga pembicaraan tidak searah yang menimbulkan salah paham. Seperti kata “bapa”, adalah hal biasa dalam sehari-hari dijumpai, tetapi kata ini bila dikaitkan dalam suasana dialog yang tidak pada posisinya akan menimbulkan kesalahpahaman. Di sini sangat dituntut kehati-hatian masing peserta dialog.
2. Gambaran tentang orang lain yang keliru. Biasanya hal ini didominasi oleh sifat kurang baik yang memperoleh informasi dari kelompok yang tidak lengkap. Misalnya seorang Muslim yang memiliki gambaran tentang orang Kristen yang sadis dan sebaliknya.
3. Nafsu membela diri. Dalam dialogi nafsu untuk menang dan membela diri harus dijauhkan dan tidak memiliki tempat. Walaupun pada dasarnya rasa itu adalah wujud manusia sebagai makhluk yang lemah.

Uraian di atas, menjelaskan bahwa dialog yang dilakukan secara proporsional dapat menjadi jalan menuju kerukunan baik intern maupun ektern. Sejak perang dunia kedua ada

dua kecenderungan agama-agama besar dunia, yaitu *ekumenisme* (pendekatan ke dalam) dan *kosultasi* (kerukunan keluar).²⁵ Karena pada dasarnya semua ajaran agama mengajar tentang hidup rukun. Kata rukun berasal dari bahasa Arab *rukun* yang berarti tiang, dasar dan sila. Atau dalam bentuk jamak “*arkaan*”; artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri atas berbagai unsur. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun adalah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan.²⁶

Dalam konteks kerukunan antar agama, seharusnya manusia satu sama lain saling menguatkan dengan manusia yang lainnya. Justeru dengan perbedaan yang ada menambah khasanah keilmuan dan saling menguatkan keyakinan yang telah dianutnya. Bukan berarti menafikan keyakinan yang telah menjadi aqidahnya. Sejalan dengan hal ini, maka dialog adalah salah satu jalan menuju kerukunan. Dialog yang dapat dilakukan selain dialog teologis intelektual pada tataran tertentu, juga dialog kultural. Dialog dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat agama harus melatih diri dalam perbedaan.

PENUTUP

Beragamnya kultur, agama, dan golongan membuat Indonesia sebagai bangsa yang rawan konflik, dari ujung timur sampai ujung barat. Kalau konflik sosial-agama itu terjadi terus terusan

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, cet. I), h. 76-77.

²⁴ Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama.*, h. 42-43.

²⁵ Ekuminisme adalah suatu gerakan yang berusaha mendekatkan berbagai macam aliran dalam suatu agama kedalam satu wadah (persatuan kedalam). Ekuminisme yang digunakan oleh Gereja-gereja untuk hubungan kedalam (antar pemeluk agama Kristen). Sedangkan dialog digunakan Greja untuk menjalin hubungan keluar. Lihat, A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini* (Jakarta : Rajawali Pers, 1987, cet. I, edisi. I), h. 363.

²⁶ Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama.*, h. 4.

dalam sebuah negara, maka negara tersebut dapat dikatakan tidak bisa menciptakan ketentraman dan keamanan dalam negerinya. Maka dari itu masalah konflik sosial-agama perlu diselesaikan secara cepat oleh pemerintah. Karena selain negara yang mengalami kerugian, masyarakat sekitar daerah konflik tersebut pun akan mengalami kerugian pula.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial-agama adalah; kurangnya adaptasi antar agama, kecemburuan ekonomi, fanatisme sempit, kurangnya pengetahuan demokrasi dan keimanan. Dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial-agama secara signifikan menunjukkan dampak negatif, yakni terganggunya keamanan, retaknya hubungan sosial, rusaknya tata kehidupan, dan kerugian materil yang tidak terhitung jumlahnya.

Pendekatan komunikasi sebagai solusi dalam penyelesaian konflik sosial dan agama yang mungkin bisa ditempuh adalah: *Abitrasi*, suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak; *Mediasi*, penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat; *Konsiliasi*, usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama; *Stalemate*, keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang; *Ajudikasi*, penyelesaian konflik di pengadilan dengan mengutamakan sisi keadilan dan tidak memihak kepada siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. "Religious Violence: Its Origin, Growth and Spread," kuliah umum pada Filsafat Agama dan Resolusi Konflik Tahun 2010.
- Ali, A. Mukti. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Pers. 1987.
- Al Munawar, Said Agil Husin. *Fikih Hubungan AntarAgama*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.
- Aripudin. *Dakwah Antar Budaya*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. 2012.
- Daya, Burhanuddin. *Agama Dialogis Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antar Agama*. Yogyakarta: LkiS. 2004.
- Dharmawan, Arya Hadi. *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*. Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema: "Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional". Pontianak 10-11 Januari 2007.
- Haba, John. "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso," dalam Irwan Abdullah, dkk. (ed.), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Idi, Abdullah. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: rajawali Press. 2010.
- Irfan, Mohammad dkk. *Teologi Pendidikan*. Jakarta: Friska Agung Insani. 2003.
- Mas`ud. Masdar Farid. "agama dan dialog" dalam buku *Dialog: Kritik*

dan Identitas Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

Nafis, Muhammad Wahyuni. *Passing Over Melintas Batas Agama*. Jakarta: PT. SUN. 2011.

Ridwan, Nurma Ali. "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal." *Jurnal IBDA*. Vol.5, No.1, 2007.

Shihab, Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan. 1994.

Sunardi, St. *Dialog cara baru beragama, Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003.

Yusuf, Ali Anwar. *Wawasan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.

<http://alfarizisalman.blogspot.com/2010/07/ontologi-dalam-perspektif-islam.html>, diakses 24 Desember 2017.

